

## **64 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru dan Penyuluh Pertanian di Kapuas Terima SK, Ini Harapan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**



*banjarmasin.tribunnews.com*

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - 64 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kapuas telah menerima SK Bupati Kapuas. Mereka ini terdiri dari 36 Guru (eks Tenaga Honorer Kategori II) dan 29 Penyuluh Pertanian (eks THL-TB).

"Penyerahan SK dilaksanakan kemarin di Aula Disdik Kapuas," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas, Aswan, Jumat (16/4/2021)

Ia pun meminta agar setelah diterimanya SK oleh P3K tersebut, kinerjanya harus semakin meningkat. Aswan menjelaskan, Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perbedaannya, hanya tidak memiliki hak pensiun serta setiap lima tahun dievaluasi. "Mari kita tingkatkan kinerja demi Kabupaten Kapuas yang lebih maju, mandiri dan sejahtera," ungkapnya. Aswan yang juga Plt Kepala Dinas Pertanian Kapuas meminta kepada para Penyuluh Pertanian, agar semakin berperan aktif dalam menjalankan tugasnya.

"Kabupaten Kapuas merupakan salah satu sasaran pengembangan Program Food Estate sebagai upaya dari pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan nasional, langkah antisipasi menghadapi adanya krisis pangan," pinta Aswan.

Sementara itu, Kadisdik Kapuas, H Suwarno Muriyat menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bupati Kapuas atas pengangkatan/penambahan guru, mengisi kekurangan pada sejumlah SD dan SMP karena pensiun atau mutasi.

Bahkan katanya dalam waktu dekat ada sejumlah sekolah yang akan ditinggal Kepala Sekolahnya karena pensiun, ironisnya PNS yang akan purna tugas itu selama ini hanya sendiri dan dibantu oleh guru honorer, karena itu dapat digantikan oleh ASN PPPK.

"Saya yakin Bapak dan Ibu Guru yang telah menerima SK PPPK akan semakin meningkat komitmen dan profesionalismenya," ujarnya. Dilanjutkannya, keberhasilan pembelajaran maupun pengelolaan pendidikan dalam arti yang luas sangat dipengaruhi oleh kualitas guru.

**Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, 64 PPPK Guru dan Penyuluh Pertanian di Kapuas Terima SK, Ini Harapan Kepala BKPSDM, Jumat, 16 April 2021;
2. Harian Kalteng Pos, 64 ASN P3K Menerima SK, Senin, 19 April 2021.

**Catatan:**

Pada Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijelaskan, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK ini merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Lebih lanjut di Pasal 7 diuraikan bahwa pengadaan PPPK yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah dilakukan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. pengumumanlowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 19 disebutkan seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi